

Strategi Pemerintahan dalam Upaya Penurunan Angka Prevalensi *Stunting* di Kota Tanjungpinang

Ayu Pebrianti^{1*}, Yudhanto Satyagraha Adiputra², Ella Afnira³
^{1,2,3} Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Jl. Raya Dompok–Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, 29115.

Korespondensi penulis: ayupebriantiayu@email.com

Abstract. *The city of Tanjungpinang has successfully reduced the prevalence of stunting consistently from 2021 to 2023, from 18,8% in 2021 to 15,7% in 2022, and to 15,2% in 2023 compared to six other regencies/cities in the Riau Islands Province. This research aims to identify the strategies used by the DKP2KB of Tanjungpinang City in efforts to reduce the prevalence of stunting from 2021 to 2023. Using a qualitative research method with a case study approach, there were nineteen informants, and data collection techniques included interviews and documentation. This research uses the strategy theory from Geoff Max Mulgan, which includes purposes, environments, directions, actions, and learning. The findings obtained are, (1) Purposes: in terms of output to achieve the national target of 14% with a performance target of 3.48% from 2021-2023 and outcomes in the form of improving the quality of human resources and the quality of life of the community. (2) Environments: still facing pollution constraints, suboptimal parenting patterns, and difficult economic conditions for the community. (3) Directions: includes commands in regulations, coordination through forums, building motivation, and effective communication. (4) Actions: activities carried out, namely sensitive interventions involving cross-sector, cross-program, and private sectors to facilitate assistance and innovation, while specific interventions involve intervening in public health. (5) Learning: all activities have been carried out well, as evidenced by the national survey results showing a decrease in stunting prevalence, although the target of 14% has not yet been reached, and the stunting program performance targets have been successfully achieved. However, the overall effectiveness of the program heavily depends on active community participation. Therefore, to address this, the researchers suggest that the government encourage knowledge, awareness, and participation from the community.*

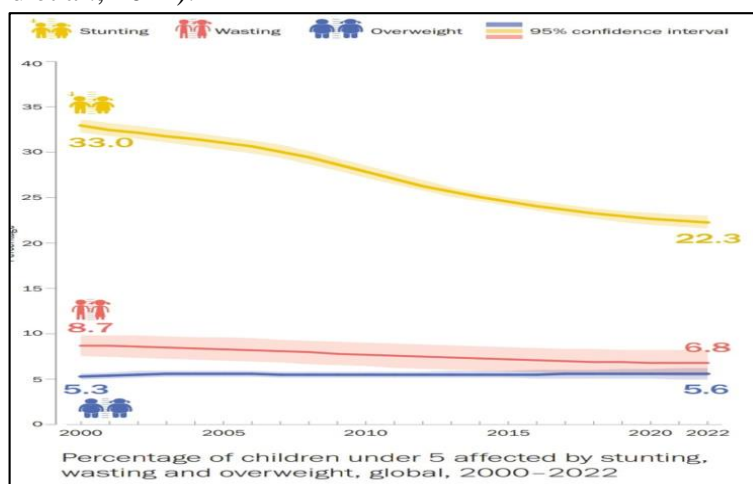
Keywords: *Tanjungpinang City, Decrease, Stunting.*

Abstrak. Kota Tanjungpinang telah berhasil menurunkan angka prevalensi *stunting* secara konsisten dari tahun 2021-2023, yaitu 18,8% pada tahun 2021, turun menjadi 15,7% pada tahun 2022, dan menjadi 15,2% pada tahun 2023 dibandingkan enam kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh DKP2KB Kota Tanjungpinang dalam upaya menurunkan angka prevalensi *stunting* pada tahun 2021-2023. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, terdapat sembilan belas informan, serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori strategi dari Geoff Max Mulgan, yaitu tujuan (*purposes*), lingkungan (*environments*), arahan (*directions*), tindakan (*actions*), dan pembelajaran (*learning*). Hasil temuan yang didapatkan, (1) Tujuan: secara *output* untuk mencapai target nasional atau 14% dengan target kinerja 3,48% dari tahun 2021-2023 dan *outcome* berupa meningkatkan kualitas SDM dan kualitas hidup masyarakat. (2) Lingkungan: masih menghadapi kendala pencemaran, belum optimalnya pola asuh, dan sulitnya kondisi ekonomi masyarakat. (3) Arahan: meliputi perintah dalam regulasi, koordinasi melalui forum, membangun motivasi, dan komunikasi yang efektif. (4) Tindakan: kegiatan yang dilakukan, yaitu intervensi sensitif yang melibatkan lintas sektor, lintas program, dan swasta untuk memfasilitasi bantuan serta inovasi, sedangkan intervensi spesifik dengan mengintervensi kesehatan masyarakat. (5) Pembelajaran: seluruh kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, terbukti dari hasil survei nasional yang menunjukkan terjadinya penurunan angka prevalensi *stunting* meskipun belum mencapai target 14% dan berhasil tercapainya target kinerja program *stunting*, namun efektivitas keseluruhan program sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengatasinya peneliti mengajukan saran, yaitu agar pemerintah mendorong pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi dari masyarakat.

Kata kunci: Kota Tanjungpinang, Penurunan, *Stunting*.

1. LATAR BELAKANG

Stunting dianggap sebagai masalah kesehatan krusial dunia, terutama Indonesia karena dampaknya yang signifikan terhadap masa depan anak bangsa dan mengancam populasi manusia dengan menurunkan kualitas manusia itu sendiri. *Stunting* merupakan masalah kekurangan gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam durasi yang cukup lama sehingga mengganggu pertumbuhan anak dengan menghambat tinggi badan menjadi tidak sesuai standar atau kerdil yang dapat terjadi, bahkan sejak masih di dalam kandungan (Hizriyani & Aji, 2021). Nyatanya, *stunting* memiliki dampak yang dikategorikan menjadi dua, yakni dampak jangka pendek berupa kegagalan tumbuh, hambatan dalam perkembangan kognitif dan motorik yang menghambat daya serap pembelajaran, gangguan metabolisme tubuh, serta tidak optimalnya perkembangan fisik; sedangkan dampak jangka panjang berupa penurunan kapasitas intelektual (Khalid et al., 2022).

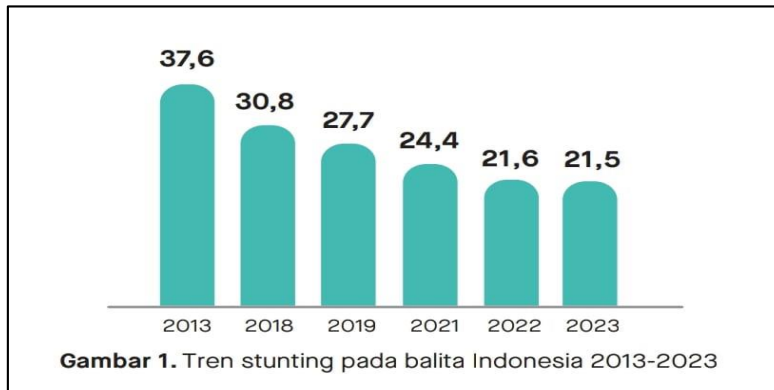


Sumber: UNICEF, WHO, dan *World Bank*, 2023.

Gambar 1. Presentase Global Balita *Stunting*, *Wasting*, dan *Overweight* Tahun 2000-2022

United Nations Children's Fund (UNICEF), *World Health Organization* (WHO), dan *World Bank* menyatakan bahwa saat ini kita hidup berdampingan dengan malnutrisi atau ketidakseimbangan nutrisi pada tubuh yang salah satunya adalah *stunting*, pada tahun 2022 terdapat 22,3% atau 148,1 juta anak yang berusia di bawah lima tahun (balita) mengalami *stunting* dengan 52% berasal dari Asia dan 43% berasal dari Afrika, diketahui bahwasanya *stunting* terus mengalami penurunan selama dekade terakhir (UNICEF et al., 2023). Meskipun, secara global menunjukkan terjadinya penurunan angka prevalensi *stunting*, tetapi angka tersebut tergolong tinggi dan menunjukkan masih banyaknya target yang harus dicapai. Berdasarkan permasalahan yang ada, WHO merekomendasikan batas toleransi *stunting* bagi suatu negara, yakni maksimal 20% (Vidianti & Jumiati, 2023). Sebuah negara akan dapat dikatakan gagal dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakatnya apabila memiliki angka

prevalensi *stunting* di atas 20%. Kekhawatiran dunia akan permasalahan *stunting*, menjadikan *stunting* sebagai target *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan nomor dua guna menghilangkan kelaparan, malnutrisi, dan menjaga ketahanan pangan yang ditargetkan pada tahun 2030 (Haskas, 2020).



Sumber: Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), SKI, 2024.

Gambar 2. Tren *Stunting* pada Balita Indonesia 2013-2023

Angka prevalensi *stunting* Indonesia perlahan mulai menunjukkan adanya perbaikan meskipun angka tersebut belum dapat mencapai target WHO sebesar 20% dan target nasional sebesar 14%. Secara global mengacu pada data dari UNICEF dan WHO, angka prevalensi *stunting* Indonesia pada tahun 2022 menempati urutan 27 dari 154 negara yang memiliki data *stunting* dan urutan lima di Negara Asia (Alam, 2023). Selain itu, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) menyatakan, angka prevalensi *stunting* Indonesia konsisten mengalami penurunan setiap tahunnya, terlihat bahwa pada tahun 2022 menuju 2023 saja telah terjadi penurunan angka prevalensi *stunting* balita meski hanya sebesar 0,1%. Namun, terpantau bahwa sekitar 1 dari 5 balita Indonesia masih mengalami *stunting* dengan kasus terbanyak menyerang balita berusia 24-35 bulan mencapai 25,8% pada 2023 (SKI, 2024).

Kepulauan Riau menjadi salah satu provinsi yang terus mengupayakan penurunan angka prevalensi *stunting*, ditandai dengan kemampuan Provinsi Kepulauan Riau meraih posisi angka prevalensi *stunting* di bawah nasional, yakni 16,8% pada tahun 2023. Adapun, bentuk dari keseriusan Provinsi Kepulauan Riau dalam menghadapi permasalahan *stunting*, yaitu menargetkan angka prevalensi *stunting* di Provinsi Kepulauan Riau turun menjadi 10,20% pada tahun 2024 dan berada di bawah target nasional (Hamdani, 2023). Pengupayaan penurunan angka prevalensi *stunting* di Provinsi Kepulauan Riau, tidak terlepas dari kontribusi tujuh kabupaten/kota yang menjadi bagian dari Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 1. Data Prevalensi Stunting Provinsi Kepulauan Riau

Data Prevalensi Stunting Provinsi Kepulauan Riau			
Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
Tanjungpinang	18,8%	15,7%	15,2%
Batam	17,5%	15,2%	16,1%
Lingga	25,4%	18,9%	20,5%
Anambas	21,7%	14,0%	15,2%
Bintan	20,0%	17,8%	21,6%
Natuna	17,8%	18,0%	16,1%
Karimun	17,6%	13,3%	17,6%
Kepulauan Riau	17,6%	15,4%	16,8%

Sumber: Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), SSGI & SKI, 2022-2024.

Berdasarkan tabel 1, terlihat bahwa kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau mengalami dinamika angka prevalensi *stunting* yang bervariasi setiap tahunnya. Namun, data tersebut juga menunjukkan bahwa Kota Tanjungpinang menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Kepulauan Riau dengan tren angka prevalensi *stunting* yang konsisten menurun sejak tahun 2021 hingga 2023, dibandingkan enam kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini menandakan, Kota Tanjungpinang berhasil menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang sukses dalam menurunkan angka prevalensi *stunting* secara konsisten selama tiga tahun terakhir. Dengan demikian, fenomena menurunnya angka prevalensi *stunting* di Kota Tanjungpinang menjadi penting untuk diteliti guna mengetahui strategi yang digunakan oleh Kota Tanjungpinang dalam upaya penurunan angka prevalensi *stunting* selama periode 2021-2023.

Tabel 2. Balita Stunting Menurut e-PPGBM Kota Tanjungpinang 2021-2023

Balita Stunting Menurut e-PPGBM Kota Tanjungpinang 2021-2023			
Kecamatan	2021	2022	2023
Tanjungpinang Timur	274	213	169
Tanjungpinang Barat	10	39	16
Bukit Bestari	161	84	118
Tanjungpinang Kota	21	80	65
Kota Tanjungpinang	466	416	368

Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat,

DKP2KB Kota Tanjungpinang, 2024.

Tabel 2 memperlihatkan adanya penurunan jumlah kasus balita *stunting* pada tahun 2021-2023. Berdasarkan data tersebut, Kecamatan Tanjungpinang Timur memiliki kasus *stunting* tertinggi, sedangkan Kecamatan Tanjungpinang Barat memiliki kasus *stunting*

terendah di Kota Tanjungpinang. Akan tetapi, penurunan angka prevalensi *stunting* di Kota Tanjungpinang belum dapat memenuhi target nasional sebesar 14%.

Penurunan angka prevalensi *stunting* tidak terlepas dari komitmen pemerintah dalam mengatasi permasalahan *stunting*. Pemerintah telah menganggap *stunting* sebagai masalah kesehatan yang serius dan berusaha mengupayakan berbagai macam cara untuk menekan tingginya angka prevalensi *stunting* di Indonesia. Langkah pemerintah dalam mengatasi permasalahan *stunting* adalah dengan menerbitkan berbagai macam peraturan, kebijakan, dan melibatkan negara pada gerakan global guna melakukan perbaikan gizi serta mendorong penurunan angka prevalensi *stunting* di Indonesia, yaitu melalui:

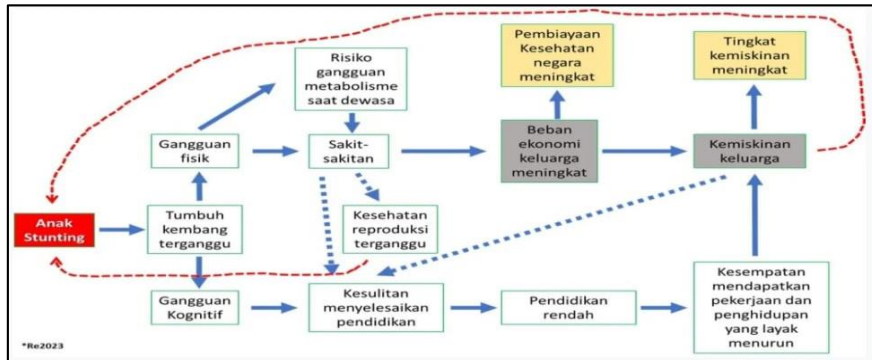
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di dalamnya turut menerangkan arah dan tujuan dari perbaikan gizi masyarakat guna terciptanya peningkatan mutu gizi individu dan masyarakat;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyatakan bahwa status gizi masyarakat menjadi pertimbangan guna pembangunan pangan dan mewajibkan pemerintah menyelenggarakan penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi (RAPG) setiap lima tahunnya;
3. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan tujuan mengakhiri adanya kelaparan dan mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan;
5. Pencegahan *stunting* masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
6. Penerbitan Kerangka Kebijakan, Panduan Perencanaan, dan Penganggaran Gerakan Nasional (Gernas) 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) pada tahun 2013;
7. Keikutsertaan Indonesia dalam gerakan global, yaitu *Scaling Up Nutrition* (SUN) pada 2011 yang turut menghasilkan Perpres Nomor 42 Tahun 2013 (Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, 2019).
8. Pada tahun 2021, Indonesia memiliki peraturan terbaru dalam mengatasi tingginya angka prevalensi *stunting* di Indonesia, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 terkait “Percepatan Penurunan *Stunting*” yang berasal dari payung hukum dan lanjutan strategi nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan *Stunting* periode 2018-2024, serta termaktub pada RPJMN Tahun 2020-2024 (Bappenas, 2021).

Penelitian ini lebih berfokus pada pengupayaan penurunan angka prevalensi *stunting* yang dilakukan oleh pemerintahan, khususnya DKP2KB Kota Tanjungpinang bagi anak dengan usia di bawah lima tahun atau 0-59 bulan. Hal ini mengingat, intervensi yang dilakukan pada anak berusia di bawah lima tahun menjadi sebuah langkah terakhir dalam usaha menangani dan mencegah *stunting* secara efektif. Selain itu, *stunting* baru dapat diketahui atau dideteksi setelah anak dilahirkan, umur 0-2 tahun merupakan masa krusial bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, serta *stunting* yang menyerang anak dengan batas usia lebih dari dua tahun tidak dapat pulih kembali (Puskesmas Gamping II, 2023).

Menurut Agus Suryono (2014), kesejahteraan masyarakat merupakan bentuk dari ketegasan pemerintah bersama lembaga sosial dan pelayanan yang disusun untuk mendorong serta membantu masyarakat memperoleh kehidupan yang lebih sehat secara maksimal (Mahardika et al., 2020). Pada dasarnya, keberhasilan suatu program atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sangat bergantung pada pemilihan strategi yang tepat. Barry (2009) menyatakan, strategi pemerintah merupakan rancangan atau struktur yang menggabungkan antara kebijakan, target sasaran, dan program dalam sebuah organisasi (Azizah et al., 2022). Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diartikan bahwa strategi pemerintahan menjadi elemen terpenting dalam menurunkan angka prevalensi *stunting* dengan menstimulasi perubahan perilaku dan pemulihan kondisi yang akan mendukung berkembang anak dengan melibatkan banyak pihak, yaitu pemerintahan selaku pelaksana, *stakeholder*, hingga masyarakat. Dengan demikian, strategi pemerintahan bukan hanya sekedar strategi yang dibuat oleh pemerintah kepada yang diperintah dalam sebuah kebijakan, melainkan proses yang lebih kompleks karena melibatkan intervensi yang dapat menghasilkan *feedback* atau tindakan timbal balik dalam ketercapaian tujuan agar lebih efektif.

Instansi pemerintahan daerah Kota Tanjungpinang yang berperan besar dalam mengelola dan mengintervensi kebijakan atau strategi nasional Percepatan Penurunan *Stunting* melalui strategi pemerintahan, yaitu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKP2KB) Kota Tanjungpinang. Hal ini, diperkuat dengan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 28 Pasal 9 Tahun 2023, diketahui bahwasanya DKP2KB Kota Tanjungpinang menyelenggarakan fungsi berupa perumusan, pelaksanaan, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan yang salah satunya mengenai gizi masyarakat, pengendalian penduduk, dan tugas lainnya (Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 28 Tahun 2023, 2023). Selain itu, didukung oleh DKP2KB Kota Tanjungpinang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dan pelaksana dari rencana aksi percepatan penurunan *stunting* dengan DKP2KB Kota Tanjungpinang sebagai sekretaris Tim Percepatan Penurunan

Stunting (TPPS) tingkat Kota Tanjungpinang yang bertujuan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan terhadap rencana aksi percepatan penurunan *stunting* tersebut (Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 22 Tahun 2023, 2023). Kegiatan intervensi seakan menjadi alat terpenting bagi DKP2KB Kota Tanjungpinang guna menjalankan strategi pemerintahan secara efektif agar derajat pembangunan kesehatan tercapai dan permasalahan kesehatan dapat diatasi.



Sumber: Purwaningtyas, SDGs UB, 2023.

Gambar 3. Skema Sederhana Dampak *Stunting*

Pernyataan tersebut, diperkuat dengan skema sederhana mengenai dampak *stunting* yang tidak hanya merugikan individu sehingga *stunting* menjadi masalah bersama (Purwaningtyas, 2023). *Stunting* juga dapat merugikan segala sektor kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi negara. Salah satunya dibuktikan dengan kerugian negara sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB) atau setara 300 triliun setiap tahunnya akibat *stunting* (Nurhasanah et al., 2022). Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana strategi pemerintahan dalam upaya penurunan angka prevalensi *stunting* di Kota Tanjungpinang?”.

2. KAJIAN TEORITIS

Strategi

Menurut Chandler dalam Kuncoro (2016) strategi merupakan sarana dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang yang dilakukan oleh organisasi, menerapkan tindakan atau intervensi, dan mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan (Timpal et al., 2021). Hal ini sejalan dengan Junaidah yang menyatakan, strategi merupakan pola atas suatu tujuan, kebijakan, program, tindakan, dan pengalokasian sumber daya yang dapat mendefinisikan organisasi, yang dilakukan oleh organisasi tersebut, dan alasan melakukannya (Junaidah, 2022). Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi pada pemerintahan adalah rancangan, cara, atau langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintahan untuk tercapainya tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu yang panjang.

Geoff Max Mulgan (2009:19) dalam bukunya yang berjudul “*The Art of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge for the Common Good*”, menyatakan bahwa “*public strategy is the systematic use of public resources and powers, by public agencies, to achieve public goals*”, yaitu strategi publik merupakan praktik penggunaan sumber daya dan kewenangan publik yang dimiliki oleh pemerintah guna mencapai tujuan bersama. Pada dasarnya, kekuasaan dan pengetahuan dalam pemerintahan harus saling beriringan dan memiliki peran yang krusial. Hal ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Geoff Max Mulgan (2009:10), yaitu ketika pemerintah memiliki kekuasaan dan pengetahuan maka tindakan akan terimplementasi secara terarah, kekuasaan merupakan cara mempertahankan diri dengan mendapatkan legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat, serta pengetahuan merupakan pemahaman mengenai keterbatasan dan peluang yang dimiliki sehingga berusaha untuk menciptakan pengetahuan atau strategi lainnya. Geoff Max Mulgan (2009:4) juga memperkenalkan teorinya mengenai strategi dengan lima indikator yang berfokus pada energi atau kekuatan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, mengingat strategi terbaik merupakan strategi yang memiliki kejelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai dan cara mencapainya. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberi perhatian pada:

1. Tujuan (*purposes*), mendefinisikan alasan yang menjadi keharusan dalam bertindak atau tujuan yang muncul dari adanya kebutuhan, aspirasi, dan kekhawatiran masyarakat atas realitas saat ini;
2. Lingkungan (*environments*), tempat untuk berusaha dalam mencapai sebuah tujuan serta ketercapaian arah melalui konteks (saat ini dan masa depan), tindakan, dan kapasitas yang dimiliki untuk menyelesaikannya sehingga dari interaksi antara pemerintah dan lingkungan akan menghasilkan sebuah pilihan;
3. Arahan (*directions*), mengarahkan tujuan atau hasil yang ingin dicapai dengan cara memberikan arahan atau komando berdasarkan prioritas dan urutan relatifnya;
4. Tindakan (*actions*), tindakan atau cara yang dilakukan dalam mencapai sebuah tujuan menggunakan strategi, kebijakan, hukum, program terperinci, dan kepemimpinan dengan tujuan untuk membujuk masyarakat agar ikut berkomitmen;
5. Pembelajaran (*learning*), sistem yang tidak hanya untuk memahami tindakan yang berhasil maupun tidak, tetapi sarana memikirkan kembali adanya tujuan, analisis, dan arah yang akan dipilih (Mulgan, 2009).

Konsep Pemerintahan

Pemerintah erat kaitannya dengan pemerintahan karena pemerintah merupakan organisasi atau badan yang menjalankan pemerintahan, sedangkan pemerintahan merupakan

kegiatan atau proses menjalankan kerangka kerja dari pemerintah dan dapat diartikan sebagai pihak yang bertugas untuk mengelola dan mengatur perintah dalam urusan pemerintahan. Menurut Finer, istilah pemerintahan memiliki arti, yaitu kegiatan atau proses dari memerintah, masalah-masalah dari negara yang dijumpai pada kegiatan atau proses, orang-orang atau pejabat yang dibebani tugas untuk melakukan perintah, dan sistem dari masyarakat untuk diperintah (Thahir, 2019). Menurut Ermaya, kata dari pemerintahan meliputi dua arti, yaitu: arti luas atau keseluruhan dari kegiatan pemerintah yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif; sedangkan arti sempit atau kegiatan dari badan publik yang disebut pemerintah meliputi kekuasaan eksekutif (Rusfiana & Supriatna, 2021). Menurut Ani Sri Rahayu (2018:5) menyatakan, pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan dari urusan pemerintahan daerah yang meliputi kepala pemerintah daerah (gubernur, bupati, dan wali kota), dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), dan dibantu oleh perangkat daerah (sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan sebagainya) (Rahayu, 2018).

Konsep Intervensi

Menurut Markam, intervensi adalah sebuah pengupayaan yang berguna untuk mengubah perilaku, pemikiran, ataupun perasaan seseorang (Budiasih, 2021). Hal yang sama juga diungkapkan oleh US *Central of Disease* (CDC) (2014) menyatakan bahwa, intervensi adalah suatu kegiatan yang dirancang untuk mengubah pengetahuan, kepercayaan atau keyakinan, sikap, tindakan atau perilaku individu maupun komunitas (Achyani et al., 2018). Sementara itu, menurut Lauterpach, intervensi merupakan keterlibatan negara secara diktator terhadap negara lainnya dengan keinginan menjaga dan mengubah suatu situasi, kondisi, dan barang-barang yang berada di negara tersebut (Padli, 2021). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya intervensi merupakan suatu kegiatan berupa tindakan yang dilakukan untuk mengubah situasi dan kondisi menjadi lebih baik dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Fokus penelitian adalah strategi pemerintahan yang dilaksanakan oleh DKP2KB Kota Tanjungpinang dalam upaya penurunan angka prevalensi *stunting*, fokus utama penelitian adalah anak usia 0-59 bulan pada periode tahun 2021-2023. Penelitian ini membatasi informan pada pihak-pihak yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan yang menjadi urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini mewawancarai 19 informan, yaitu 4 staf DKP2KB Kota Tanjungpinang, 6 orang masyarakat Kota Tanjungpinang, 3 staf puskesmas, dan 6 kader posyandu. Adapun, teknik analisa data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan (*purposes*)

Kota Tanjungpinang menganut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang menetapkan target dari penurunan angka prevalensi *stunting*, yaitu 14% pada tahun 2024. Dengan demikian, tujuan dari DKP2KB Kota Tanjungpinang dalam mengatasi masalah ini, yaitu secara *output* adalah mendukung dan menyukseskan ketercapaian target nasional tersebut. Titik awal dari ketercapaian target tersebut bergantung pada kondisi awal dari masing-masing wilayah, oleh karena itu Kota Tanjungpinang memulai upaya penurunan angka prevalensi *stunting* dari 18,8% pada tahun 2021 sebagai titik awal menuju ketercapaian target nasional. Namun, secara *outcome* atau dampak jangka panjangnya adalah menciptakan generasi di masa depan yang memiliki kualitas SDM sehat, bebas *stunting*, dan memiliki berat badan sesuai dengan usianya.

**Tabel 3. Target Capaian Kinerja Persentase Balita Stunting
Kota Tanjungpinang 2021-2023**

Target Capaian Kinerja Persentase Balita <i>Stunting</i> Kota Tanjungpinang 2021-2023		
2021	2022	2023
3,48%	3,48%	3,48%

Sumber: Pemerintah Kota Tanjungpinang, RKPD Kota
Tanjungpinang Tahun 2021-2023, 2020-2022.

Kota Tanjungpinang menetapkan target capaian kinerja dalam mengatasi permasalahan *stunting* yang sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan tertera pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). *Stunting* masuk ke dalam prioritas pembangunan daerah tahun 2021-2023 dan tertera pada RKPD Kota Tanjungpinang karena menjadi urusan bidang kesehatan yang memiliki indikator capaian rendah atau belum mencapai target pada tahun 2019 serta masih adanya balita yang mengalami *stunting* (pendek) (Pemerintah Kota Tanjungpinang, 2020). Berdasarkan tabel 3, target capaian kinerja dari persentase yang ditetapkan dalam menanggulangi permasalahan *stunting* dari tahun 2021-2023 adalah sebesar 3,48% setiap tahunnya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 maka dibentuklah tim-tim yang menjadi elemen strategis guna mendukung ketercapaian penurunan angka prevalensi *stunting*

di Kota Tanjungpinang. Pembentukan tim-tim tersebut menjadi alat bantu atau perangkat yang dirancang untuk mencapai target atau tujuan secara efektif dan efisien. Adapun, tim-tim yang telah terbentuk dan sudah berjalan dalam mengupayakan terjadinya penurunan angka prevalensi *stunting* di Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

1. Tim percepatan penurunan *stunting* (TPPS) tingkat kota atau TPPS Kota Tanjungpinang dibentuk pada bulan Desember tahun 2021, terdiri dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang berperan dalam intervensi sensitif atau mengatasi penyebab tidak langsung permasalahan *stunting* dan berada di luar dari ranah kesehatan;
2. Tim pendamping keluarga (TPK) dibentuk pada bulan Desember 2021, terdiri dari unsur pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), sub pembantu pembinaan keluarga berencana desa (sub-PPKBD), dan bidan di wilayah kerja. Selain itu, TPK Kota Tanjungpinang memiliki 81 tim dengan 243 anggota, satu tim memiliki tiga anggota, dan tersebar di 18 kelurahan;
3. Tim percepatan penurunan *stunting* (TPPS) tingkat kecamatan dan kelurahan dibentuk pada bulan Maret tahun 2022 atas perintah dari TPPS tingkat kota;
4. Tim Audit Kasus *Stunting* dibentuk pada tahun 2022 yang terdiri dari dua tim, yaitu tim pakar dan tim teknis. Tim pakar terdiri dari tiga rumah sakit di Kota Tanjungpinang dengan anggota yang berasal dari unsur dokter spesialis anak, dokter *obgyn* atau kandungan, psikologi, dan ahli gizi. Sementara itu, tim teknis terdiri dari puskesmas se-Kota Tanjungpinang dengan anggota yang berasal dari unsur dokter umum se-Puskesmas Kota Tanjungpinang, ahli gizi, dan kader TPK.

Lingkungan (*Environments*)

Lingkungan berperan penting dalam upaya penurunan angka prevalensi *stunting*, karena terdapat ancaman maupun kesempatan yang datang dari lingkungan tersebut. Pada dasarnya, faktor lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal yang terdapat di DKP2KB Kota Tanjungpinang dan jajarannya berupa sumber daya manusia kesehatan, anggaran atau pendanaan, teknis, dan operasional.

Pertama, sumber daya manusia kesehatan (SDMK), berdasarkan dokumen presentasi dari DKP2KB Kota Tanjungpinang mengenai “Kolaborasi Tata Kelola Pelayanan Kesehatan untuk Menurunkan Angka *Stunting*” (2024), menjelaskan bahwa Kota Tanjungpinang memiliki potensi SDM yang sudah baik dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* karena telah dibentuknya Tim Audit Kasus *Stunting*. Selain itu, SDM yang turut membantu pengupayaan penurunan angka prevalensi *stunting* di Kota Tanjungpinang terdiri dari: TPPS tingkat kota, TPPS tingkat kelurahan, TPPS tingkat kecamatan, TPK, kader posyandu,

puskesmas, kader pemberian makanan tambahan (PMT) pangan lokal, konselor menyusui, konselor pemberian makanan bayi dan anak (PMBA), Tim Asuhan Gizi, serta SDMK lainnya ikut berkontribusi mendukung penurunan angka prevalensi *stunting* di Kota Tanjungpinang. Adapun, SDMK tersebut telah dilengkapi dengan kemampuan dan kompetensi yang memadai.

Kedua, anggaran dan pendanaan, pengalokasian anggaran tersebut didasari oleh skala prioritas dari program-program yang telah direncanakan sekaligus menyesuaikan ketersediaan pendanaan dari pemerintah pusat. Puskesmas juga memperoleh pendanaan dari pemerintah pusat yang berasal dari APBD dan disebut sebagai bantuan operasional kesehatan (BOK), pendanaan ini salah satunya dimanfaatkan guna menyediakan PMT pangan lokal bagi balita berisiko *stunting* dan ibu hamil KEK selama tiga bulan dalam satu tahun di wilayah kerjanya. Dengan demikian, ketersediaan dari anggaran dan pendanaan yang memadai tersebut akan memastikan program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang disusun.

Ketiga, teknis, yaitu penyusunan dan penerapan prosedur dari program yang dijalankan, dalam hal ini lingkungan internal teknis mencakup upaya pemantauan berat dan tinggi badan balita agar *stunting* cepat berdeteksi. Pada dasarnya, DKP2KB Kota Tanjungpinang dalam melakukan usaha pemantauan risiko permasalahan *stunting* pada anak se-Kota Tanjungpinang membutuhkan peran kader posyandu untuk menimbang, mengukur, dan melakukan rujukan terhadap anak dengan permasalahan berat badan kurang kepada puskesmas setiap bulannya. Selanjutnya, hasil pemantauan para kader posyandu diserahkan kepada puskesmas dan diinput melalui aplikasi sistem informasi gizi terpadu (Sigizi Terpadu) guna melaporkan serta menganalisis status gizi balita melalui elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) di wilayah kerja masing-masing.

Tabel 4. Fasilitas Kesehatan Kota Tanjungpinang Tahun 2021-2023

Fasilitas Kesehatan Kota Tanjungpinang Tahun 2021-2023			
Fasilitas Kesehatan	2021	2022	2023
Rumah Sakit	3	3	3
Puskesmas	7	7	8
Puskesmas Pembantu (Pustu)	11	11	11
Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel)	18	18	18
Posyandu Balita	140	141	145

Sumber: Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan,
DKP2KB Kota Tanjungpinang, 2022-2024.

Keempat, operasional, terdapat peningkatan terhadap infrastruktur kesehatan atau fasilitas kesehatan yang memadai dan menunjang terjadinya penurunan angka prevalensi *stunting* di Kota Tanjungpinang dari tahun 2021-2023, yaitu penambahan jumlah puskesmas

serta posyandu balita. Berbagai fasilitas kesehatan tersebut tentunya telah dilengkapi dengan perlengkapan sarana dan prasarana kesehatan yang di dalamnya termasuk alat ukur antropometri untuk membantu proses penimbangan dan pengukuran, serta alat-alat penunjang pencatatan status gizi balita. Selain itu, membangun koordinasi dan kolaborasi internal antar program dan antar bidang juga merupakan bagian dari operasional agar kegiatan yang dilakukan dapat sampai kepada masyarakat dan memberikan umpan balik sehingga melahirkan keefektifitasan dalam penurunan angka prevalensi *stunting*.

Mengupayakan penurunan angka prevalensi *stunting* di Kota Tanjungpinang tidak hanya melalui lingkungan internal saja, namun juga memerlukan peran besar lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal merupakan lingkungan di luar dari ranah pemerintah dan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penurunan angka prevalensi *stunting*. Lingkungan eksternal, meliputi lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi.

Pengupayaan penurunan angka prevalensi *stunting* di Kota Tanjungpinang masih menemui banyak tantangan yang pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor. Lingkungan fisik, didasari kondisi lingkungan yang kurang bersih, beberapa wilayah di Kota Tanjungpinang ditemukan adanya kasus pencemaran air dengan kadar *E. coli* yang tinggi, akibatnya pencemaran ini akan berdampak serius terhadap kesehatan bayi dan balita karena dapat mengakibatkan terjadinya infeksi berulang sehingga meningkatkan risiko *stunting*. Lingkungan sosial, mengubah perilaku dan pengetahuan masyarakat menjadi sebuah tantangan besar akibat dari keduanya dibangun dan dipengaruhi oleh segala aspek sehingga sulit untuk diukur perubahannya. Lingkungan ekonomi, tidak semua masyarakat di Kota Tanjungpinang mampu memenuhi asupan gizi anak melalui pemberian makanan empat sehat lima sempurna karena keterbatasan ekonomi yang dimiliki sehingga anak seringkali mengkonsumsi makanan dengan harga terjangkau dan cenderung seadanya.

Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya permasalahan *stunting* adalah partisipasi, pengetahuan, dan kesadaran masyarakat karena berdampak pada penerapan pola asuh yang kurang optimal sehingga menghambat efektivitas dari intervensi dalam mencegah serta mengatasi *stunting*. Beberapa informan dari DKP2KB Kota Tanjungpinang, puskesmas, dan posyandu menyatakan bahwa terdapat tantangan dalam melakukan upaya penurunan angka prevalensi *stunting* dan pelaksanaan dari intervensi *stunting*, yaitu sebagai berikut: tidak semua masyarakat bersedia mengajak anaknya untuk mengunjungi posyandu sehingga tidak semua balita dapat diukur, masyarakat jarang berkunjung ke posyandu ketika anaknya sudah selesai mendapatkan imunisasi, pengetahuan dan perilaku masyarakat yang sulit untuk diubah, terdapat sekitar 10%-20% masyarakat yang menolak untuk dilakukannya

intervensi *stunting*, masyarakat kurang untuk menerima masukan dan tidak menyadari bahwa anaknya memiliki permasalahan kesehatan, kurang berat badan, bahkan *stunting* serta kurangnya kepedulian dari masyarakat, minimnya pengetahuan, dan kurangnya masyarakat berpartisipasi dalam mengikuti edukasi.

Arahan (*directions*)

Pertama, perintah (*command*), Berikut merupakan kebijakan yang digunakan oleh Kota Tanjungpinang untuk mengupayakan penurunan angka prevalensi *stunting*, yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia (RAN-PASTI) Tahun 2021-2023;
3. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 22 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, di dalamnya tertera mengenai rencana aksi atau tata cara pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *stunting* Kota Tanjungpinang;
4. Keputusan Wali Kota Nomor 764 Tahun 2021 Tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Tanjungpinang;
5. Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 214 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2022-2024;
6. Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 215 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan Bukit Bestari Tahun 2022-2024;
7. Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 216 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan Tanjungpinang Kota Tahun 2022-2024;
8. Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 217 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan Tanjungpinang Barat Tahun 2022-2024;
9. Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 512 tahun 2022 tentang Tim Audit Kasus *Stunting* Kota Tanjungpinang Tahun 2022;
10. Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 252 tahun 2023 tentang Penetapan Kelurahan sebagai Kampung Keluarga Berkualitas di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 sehingga saat ini 18 kelurahan di Kota Tanjungpinang telah memiliki Kampung Keluarga Berkualitas yang sudah terdaftar di Aplikasi Siga dan Web BKKBN;
11. Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 512 tahun 2023 tentang Kampung Keluarga Berkualitas untuk mengaktifkan Dapur Sehat Atasi *Stunting* di 18 kelurahan;
12. Keputusan Lurah se-Kota Tanjungpinang tentang Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebanyak 81 tim yang tersebar di empat kecamatan dan 18 kelurahan;

13. Keputusan Lurah se-Kota Tanjungpinang tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kelurahan Se-Kota Tanjungpinang.

Pada dasarnya, kebijakan atau perintah yang terdapat di Kota Tanjungpinang dibentuk oleh wali kota sebagai komando, sementara itu peran DKP2KB Kota Tanjungpinang adalah memonitoring dan memantau keterlaksanaan dari program tersebut di lapangan. Kedua, koordinasi (*coordination*), dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat (berbagai tim, lintas sektor, lintas program, dan swasta) melalui forum pertemuan, yaitu rapat koordinasi, mini loka karya, dan lainnya. Ketiga, komunikasi (*communication*), dibangun secara bertingkat dari pusat ke daerah dan diteruskan pada pihak pelaksana. Keempat, motivasi (*motivation*), dibangun untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, memberikan evaluasi melalui sistem rapor merah, dan memberi penghargaan dengan adanya sistem juara pada Kampung Keluarga Berkualitas.

Tindakan (*actions*)

Pengupayaan penurunan angka prevalensi *stunting* terbagi menjadi dua jenis intervensi, yaitu intervensi sensitif dan intervensi spesifik yang saling mendukung terjadinya ketercapaian hasil yang optimal. Intervensi sensitif merupakan intervensi yang secara tidak langsung dapat mendukung penurunan dan pencegahan *stunting* atau melakukan intervensi terhadap lingkungan sekitar sehingga melibatkan banyak pihak dengan menyumbang kontribusi 70% dalam menurunkan angka prevalensi *stunting*. Selain itu, intervensi spesifik menyangkut dalam hal mengatasi permasalahan yang menjadi penyebab langsung dari *stunting* atau berhubungan langsung dengan kesehatan fisik dan memiliki kontribusi 30% terhadap penurunan angka prevalensi *stunting*. Komposisi tersebut menyatakan bahwa intervensi spesifik memberikan dampak yang terbatas dan intervensi sensitif memberikan dampak jangka panjang terhadap hasil yang ingin dicapai sehingga jika hanya mengedepankan intervensi spesifik maka kemungkinan terjadinya penurunan angka prevalensi *stunting* akan sangat kecil.

Bentuk kegiatan kerjasama lintas sektor yang berada langsung di masyarakat adalah puskesmas dan posyandu dapat memanfaatkan peran dari Babinsa dan Bhabinkamtibnas sebagai mitra untuk mempersuasi dan menertibkan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam upaya penurunan angka prevalensi *stunting*, misalnya memastikan anak mengunjungi posyandu untuk penimbangan dan pengukuran berat badan. Penanganan permasalahan dari rendahnya ekonomi masyarakat dapat ditangani oleh Dinas Sosial Kota Tanjungpinang melalui program keluarga harapan (PKH); penanganan dari ketersediaan pangan dan memberikan bantuan pangan atau sembako berupa beras kepada masyarakat yang terdampak *stunting* dilakukan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang, serta memastikan

ketersediaan dan kelayakan air minum bersih dan sanitasi yang baik (pengadaan jamban dan lainnya) menjadi tugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang yang dalam hal ini didasari oleh data keluarga risiko *stunting* (KRS) sehingga tepat sasaran dan menyesuaikan kebutuhan dari masyarakat. Selain itu, kolaborasi antar lintas program juga akan dapat mengelola sumber daya yang lebih efektif dan efisien karena setiap program memiliki bagiannya masing-masing dalam membantu melakukan intervensi sensitif karena ikut andil melakukan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi.

Salah satunya dengan pemantauan balita yang tidak ingin dipantau atau datang ke posyandu, pemantauan air minum yang layak, pemantauan akses sanitasi yang layak, dan sebagainya. Pihak swasta juga dilibatkan dalam hal ini, seperti: Hypermart, Pegadaian, Angkasa Pura, Dealer Yamaha, dan pihak swasta lainnya. Bantuan yang diberikan oleh pihak swasta adalah menjaga kebersihan lingkungan dan sanitasi dengan memastikan aktivitas produksi yang dilakukan tidak mencemari lingkungan sekitar dan mendukung terjaganya kebersihan dengan melakukan pengelolaan yang tepat serta bertanggung jawab. Selain itu, dilakukannya pemberian bantuan secara langsung kepada balita *stunting* dengan memberikan uang dan sembako untuk menunjang ketercapaian dari penurunan angka prevalensi *stunting*.

Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan terhadap upaya penurunan angka prevalensi *stunting* adalah dengan cara membaginya menjadi wilayah prioritas berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi dan tingkat kasus *stunting* tertinggi melalui rapat koordinasi yang disebut sebagai rembuk *stunting*. Lokus *stunting* di Kota Tanjungpinang yang masuk ke dalam wilayah prioritas terdiri dari Kelurahan Pinang Kencana, Kelurahan Tanjung Unggat, Kelurahan Kampung Bugis, Kelurahan Sei Jang, Kelurahan Air Raja, dan Kelurahan Batu IX. Pada dasarnya, terdapat inovasi yang diciptakan dalam upaya menurunkan angka prevalensi *stunting* di Kota Tanjungpinang yang diprakarsai oleh pihak kecamatan dan kelurahan untuk menggerakkan dukungan dari seluruh elemen, yaitu masyarakat, lintas sektor, lintas program, dan pihak swasta karena pihak kecamatan dan kelurahan memiliki hak secara langsung untuk mengintervensi masyarakatnya. Inovasi-inovasi yang terdapat di Kota Tanjungpinang dan telah dilaksanakan, yaitu: Dompot Peduli di Kelurahan Tanjungpinang Barat yang telah dilakukan sejak tahun 2021, kegiatan Pegi *Stunting* (perbaikan gizi anak *stunting*) dilakukan sejak tahun 2023 oleh Kelurahan Sei Jang, Dapur Sehat Atasi *Stunting* (Dashat) yang berlangsung sejak 2023 di Kelurahan Senggarang, kegiatan Sigap Tanggap Atasi *Stunting* (Sitang Ating) dilakukan oleh Puskesmas Sei Jang yang dibentuk pada tahun 2022, dan kegiatan Cegah *Stunting* dengan Edukasi Makanan Sehat Seimbang (Gasing Mass) dilakukan oleh Puskesmas Batu 10 sejak tahun 2019. Selain itu, terdapat inovasi

lainnya, seperti Rumpi Penting (forum posyandu peduli *stunting*), Sedulur (sedekah telur), dan Goceng yang dibentuk pada tahun 2024 untuk turut membantu dalam mencegah dan menanggulangi permasalahan *stunting*.

Pembangunan dan peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan oleh DKP2KB Kota Tanjungpinang melalui beragam cara dan media. Pembangunan dan peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan melalui dua jenis media informasi, yaitu media cetak berupa poster, *leaflet*, spanduk, dan baliho, serta media digital berupa media sosial (Facebook dan Instagram) dan pembuatan video *talk show* tentang *stunting* yang bekerjasama dengan ulasan TV, Ficom *Channel*, dan RRI Tanjungpinang melalui metode penyuluhan. Mengikutsertakan dukungan masyarakat yang dilakukan dengan media pertemuan secara perorangan maupun melalui penyuluhan, seperti posyandu, pertemuan kader, kelas ibu hamil, kelas balita, majelis taklim, forum PKK, forum dasawisma, dan sebagainya untuk dilakukan edukasi dan sosialisasi. Pembangunan dan peningkatan kesadaran masyarakat juga turut dihadirkan pada lingkup lembaga pendidikan, yaitu sekolah dan kampus dengan keterlibatan generasi berencana (GenRe) melalui pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R) untuk menyampaikan informasi kepada teman sebayanya dan metode pojok sekolah siaga kependudukan (SSK) untuk memberikan informasi kepada siswa mengenai informasi dari masalah kependudukan.

Penurunan angka prevalensi *stunting* tidak hanya memerlukan adanya intervensi sensitif yang meliputi perbaikan lingkungan, namun juga memerlukan peran penting dari intervensi spesifik yang langsung menasar pada penyebab utama dari permasalahan *stunting*. Intervensi spesifik menjadi langkah dalam membantu menangani permasalahan ini melalui intervensi terhadap kesehatan manusia. Dengan demikian, intervensi spesifik akan memiliki dampak secara langsung terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga *stunting* akan dapat dicegah dan ditangani.

Pertama, intervensi kepada remaja putri dilakukan dengan memberikan tablet tambah darah (TTD) sebanyak satu tablet seminggu selama 52 minggu atau satu tahun dan pada tahun 2023 memiliki cakupan remaja putri yang dilakukan skrining sebanyak 94,8% atau 3.839 dari 4.050 remaja putri, kegiatan ini menjadi kegiatan skrining Hb pertama kali dan mendapat alat *strip* Hb dari Kementerian Kesehatan. Kedua, intervensi yang dilakukan untuk ibu hamil dengan memberikan TTD sebanyak 90 tablet selama kehamilan untuk mengantisipasi risiko bayi memiliki berat badan lahir rendah (BBLR) karena memicu terjadinya *stunting*. Selain itu, Ibu hamil yang memiliki risiko kurang energi kronis (KEK) akan diintervensi dengan diberikannya pemberian makanan tambahan (PMT) pangan lokal, yaitu pemberian makanan olahan setiap harinya berupa enam hari makanan kudapan dan satu hari makanan lengkap (nasi

beserta lauk-pauk) selama 120 hari atau empat bulan atas dana dari APBN. Intervensi yang dilakukan pada ibu hamil juga dilakukan dengan pemberian penyuluhan dan edukasi manfaat dari TTD, gizi seimbang, inisiasi menyusui dini (IMD), dan ASI Eksklusif yang dilakukan secara perseorangan maupun melalui kelas ibu hamil. Ketiga, intervensi kepada anak usia 0-59 bulan dan tertera pada Profil Kesehatan Kota Tanjungpinang, yaitu:

1. Jumlah BBLR di Kota Tanjungpinang kian menurun, yaitu 182 bayi pada tahun 2021, 168 bayi pada tahun 2022, dan 132 bayi pada tahun 2023;
2. IMD dari tahun 2021-2023 berada di atas 80%, namun memiliki persentase yang fluktuatif jika dilihat di tiga tahun belakangan. Selain itu, persentase bayi < 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023 meskipun belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 80%;
3. Penimbangan balita yang berkunjung ke posyandu mengalami peningkatan dari 64,7% pada tahun 2021, meningkat menjadi 67,7% pada tahun 2022, dan 69,0% pada 2023;
4. Cakupan dari pemantauan pertumbuhan dan perkembangan terjadi penurunan dari 84,7% pada tahun 2022 menjadi 80,5% pada tahun 2023 yang belum dapat memenuhi target dari intervensi spesifik, yaitu 90% pada tahun 2024;
5. Proses penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan akan menjangkau balita yang bermasalah atau berisiko *stunting* maka langkah selanjutnya yang dilakukan posyandu adalah merujuk balita ke puskesmas untuk dilakukan intervensi lebih lanjut. Selain itu, puskesmas juga melakukan penjangkauan anak yang memiliki risiko *stunting* melalui aplikasi Sigizi Terpadu, hal ini karena data tersebut akan mengetahui, memantau, dan menjangkau balita dengan berat badan kurang (*underweight*), balita pendek (*stunting*) dan balita gizi kurang (*wasting*);
6. Langkah selanjutnya adalah intervensi dengan menyediakan PMT pangan lokal bagi balita yang tidak naik berat badan (T) selama 14 hari, balita yang *underweight* atau berat badan di bawah dari ukuran normal selama 28 hari, dan *wasting* atau status gizi kurang selama 56 hari serta akan dilanjutkan ketika anak belum mengalami kenaikan berat badan.

Kegiatan yang dilakukan dalam program PMT pangan lokal adalah monitoring kepatuhan mengkonsumsi makanan tambahan yang telah diberikan dilakukan melalui laporan dari ibu balita di grup WhatsApp, monitoring kenaikan berat badan balita yang mendapat PMT pangan lokal setiap seminggu sekali, serta konseling dan edukasi gizi kepada keluarga balita. Tantangan dalam mengupayakan PMT pangan lokal kepada balita berisiko *stunting* adalah:

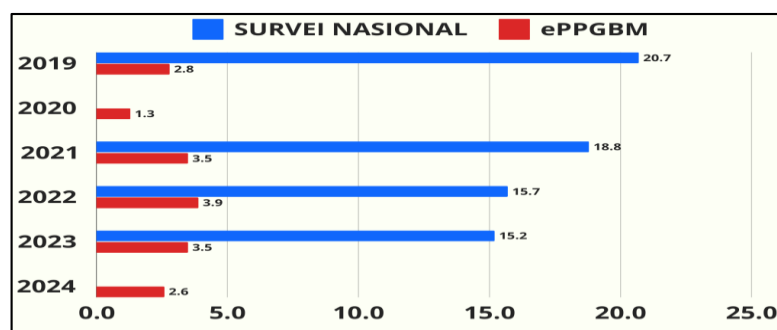
1. Tidak dilakukan rujukan dari posyandu ke puskesmas ketika terjadi *weight faltering* atau ketika berat badan anak tidak naik (T) dikarenakan banyaknya balita T yang berada di posyandu;
2. Terdapat balita bermasalah gizi yang tidak bersedia diberikan PMT pangan lokal;
3. PMT pangan lokal yang seharusnya berfungsi sebagai kudapan sering kali diberikan kepada anak pada jam makan utama;
4. Masyarakat cenderung bergantung pada PMT pangan lokal, padahal tujuan utamanya adalah mendidik orang tua untuk memberikan makanan bergizi seimbang;
5. PMT pangan lokal sering kali tidak hanya dikonsumsi oleh balita, padahal komposisinya telah dirancang untuk pemenuhan gizi satu orang balita;
6. Anak melakukan gerakan tutup mulut (GTM) dan anak tidak menyukai makanan yang disediakan dari program PMT pangan lokal;
7. Kurangnya kesadaran dari keluarga balita untuk memberikan makanan olahan yang sama seperti PMT pangan lokal.

Upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi tantangan tersebut adalah dengan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan kader posyandu terkait alur rujukan, kader posyandu sudah terorientasi kemampuan untuk menimbang berat badan dan mengukur panjang badan sehingga memudahkan dalam pengumpulan data balita, puskesmas dapat memenuhi kebutuhan bahan terapi gizi berupa PMT pangan lokal dari alokasi anggaran BOK, serta mengikutsertakan kader posyandu untuk ikut memberikan konseling kepada ibu balita mengenai makanan dan cara pembuatannya.

Hasil dari upaya PMT pangan lokal menurut petugas puskesmas telah menunjukkan hasil yang positif karena menunjukkan terjadinya peningkatan pada berat badan anak. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan masyarakat, beberapa menyatakan bahwa dampak dari PMT pangan lokal terhadap peningkatan berat badan anak belum cukup signifikan karena berat badan anak cenderung masih mengalami fluktuasi meskipun terjadi kenaikan secara perlahan. Selain itu, bantuan PMT pangan lokal lebih berfungsi sebagai kudapan dan hanya bersifat sementara sehingga dampak yang diberikan tidak berjangka panjang terhadap peningkatan berat badan anak, namun bantuan dari segi edukasi bagi para ibu balita menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dalam praktik pemberian makanan kepada anak sehari-hari meskipun beberapa menyesuaikan pemberian makanan dengan kondisi ekonomi sehingga tidak sepenuhnya memenuhi prinsip gizi seimbang atau empat sehat lima sempurna.

Penurunan angka prevalensi *stunting* juga menghasilkan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) yang telah dilakukan dari tahun 2021 hingga saat ini sebagai solusi dari minimnya anggaran. BAAS merupakan pemberian sumbangan berupa uang Rp750.000,- setiap bulannya untuk pemenuhan asupan gizi dari anak-anak berisiko *stunting* yang membutuhkan melalui pemberian makanan sebanyak tiga kali sehari (pagi, siang, dan sore) dengan durasi pemberian dua hingga tiga bulan. Adapun, BAAS diperankan oleh seluruh kepala OPD dan pihak swasta, namun tidak dilaksanakan secara kontinu melainkan bergantung pada terkumpulnya sumbangan yang diberikan. Kegiatan BAAS telah membuahkan hasil dengan ditunjukkan oleh terjadinya kenaikan dari berat dan tinggi badan anak sehingga anak dapat terbebas dari *stunting*.

Pembelajaran (*learning*)



Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, DKP2KB Kota Tanjungpinang, 2024.

Gambar 4. Hasil Survei Nasional dan e-PPGBM mengenai *Stunting* di Kota Tanjungpinang

Berdasarkan hasil dari survei nasional berupa SSGI dan SKI pada gambar 4 memperlihatkan, angka prevalensi *stunting* di Kota Tanjungpinang mengalami penurunan yang signifikan, dari 18,8% pada tahun 2021 menjadi 15,7% pada tahun 2022 dan lebih lanjut turun menjadi 15,2% pada tahun 2023 meskipun belum mencapai target nasional, yaitu 14%. Penurunan ini dapat mencerminkan terjadinya keberhasilan dalam upaya penurunan angka prevalensi *stunting* di Kota Tanjungpinang yang sejalan dengan terciptanya tren positif dari survei nasional tersebut. Indikator keberhasilan dari penurunan angka prevalensi tidak hanya dinilai dari survei nasional melainkan juga dilihat dari e-PPGBM yang dikelola pada masing-masing puskesmas, e-PPGBM berfungsi sebagai alat bantu untuk memantau dan menjangring permasalahan gizi buruk, risiko gizi kurang, bumil KEK, dan catin anemia yang kemudian akan ditindaklanjuti sehingga intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan berhasil menurunkan angka prevalensi *stunting*. Dengan demikian, secara e-PPGBM memperlihatkan angka prevalensi *stunting* Kota Tanjungpinang

yang mengalami fluktuatif karena tercatat bahwa pada tahun 2021 berada diangka 3,5% yang pada tahun 2022 naik menjadi 3,9% dan turun kembali menjadi 3,5% pada tahun 2023. Fluktuasi ini dapat dipengaruhi oleh terjadinya peningkatan jumlah maupun persentase balita yang dilakukan penimbangan karena e-PPGBM dipantau dari partisipasi penimbangan balita, yaitu pada tahun 2021 berjumlah 13.965 atau 64,7% yang pada tahun 2022 naik menjadi 14.608 atau 67,7% dan tahun 2023 menjadi 13.710 atau 69,0%. Akan tetapi, pengukuran ini masih menghadapi kendala berupa belum semua balita yang masuk kedalam sasaran terukur dan tidak semua balita mengunjungi posyandu sehingga hal ini dapat memengaruhi akurasi pemantauan.

Tabel 5. Jumlah Kasus *Stunting* Menurut Puskesmas Kota Tanjungpinang 2021-2023

Jumlah Kasus <i>Stunting</i> Menurut Puskesmas Kota Tanjungpinang 2021-2023							
Puskesmas	Kecamatan	2021		2022		2023	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Batu 10	Tanjungpinang Timur	231	9.4	79	7.1	102	4.4
Melayu Kota Piring		37	2.4	71	6.3	21	2.6
Mekar Baru		6	0.3	63	2.8	46	2.7
Tanjungpinang	Tanjungpinang Barat	10	0.3	39	1.4	16	0.8
Sei Jang	Bukit Bestari	130	5.2	41	2.3	67	3.3
Tanjung Unggat		31	4.3	43	8.4	51	8.5
Kampung Bugis	Tanjungpinang Kota	21	1.8	80	7.4	65	6.6
Total		466	3,5	416	3,9	368	3,5

Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat,

DKP2KB Kota Tanjungpinang, 2022-2024.

Jumlah kasus *stunting* pada masing-masing puskesmas mengalami fluktuasi dari tahun 2021 hingga 2023. Keadaan ini diakibatkan oleh partisipasi dari kunjungan balita yang melakukan penimbangan di posyandu, anak sudah berusia lebih dari lima tahun sehingga dikeluarkan dari pemantauan maka akan mengalami penurunan jumlah kasus maupun persentase, dan terdapat anak yang mengalami 2T atau dua kali dilakukan penimbangan tidak naik berat badan maka akan dimasukkan kedalam pemantauan sehingga jumlah kasus maupun persentase akan naik. Tabel 5 tersebut juga menunjukkan bahwa Puskesmas Batu 10 memiliki jumlah kasus paling banyak jika dilihat dari tahun 2021 hingga 2023, sedangkan Puskesmas Tanjungpinang memiliki jumlah kasus paling sedikit jika dilihat dari tahun 2021 hingga 2023.

Tabel 6. Capaian Kinerja DKP2KB Kota Tanjungpinang Mengenai Stunting 2021-2023

Capaian Kinerja DKP2KB Kota Tanjungpinang Mengenai Stunting 2021-2023					
2021		2022		2023	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3,48%	3,49%	3,48%	3,91%	3,48%	3,98%

Sumber: DKP2KB Kota Tanjungpinang, LPPD DKP2KB

Kota Tanjungpinang 2022-2023, 2023-2024.

Tabel 6 menunjukkan tren peningkatan yang positif dan signifikan dari tahun 2021-2023. Pada tahun 2021, kinerja dari DKP2KB Kota Tanjungpinang berada di angka 3,49% meningkat menjadi 3,91% pada tahun 2022 dan terus mengalami kenaikan di angka 3,98% pada tahun 2023. Adapun, cakupan kinerja dari DKP2KB Kota Tanjungpinang dalam program *stunting* pada tahun 2021-2023 telah berhasil melebihi target yang telah ditetapkan. Keberhasilan dan peningkatan ini mencerminkan komitmen dari DKP2KB Kota Tanjungpinang dalam upaya menurunkan angka prevalensi *stunting* melalui intervensi, seperti edukasi, peningkatan pelayanan, serta membangun kolaborasi dan kerjasama. Tren ini juga menunjukkan terjadinya keberhasilan dalam mengimplementasikan strategi pemerintahan yang telah dibangun meskipun belum sepenuhnya sempurna. Keberhasilan dari upaya menurunkan angka prevalensi *stunting* pada dasarnya sangat bergantung pada pola asuh, pemahaman, dan cara ibu untuk berperan dalam mencegah serta mengatasi permasalahan *stunting* pada anaknya. Sementara itu, DKP2KB Kota Tanjungpinang, puskesmas, dan kader posyandu hanya dapat memberikan dorongan dan edukasi kepada ibu serta keluarga balita dalam melakukan perbaikan dalam pola hidup sehari-hari.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertama, tujuan strategis atau misi yang disusun dalam rangka menurunkan angka prevalensi *stunting* di Kota Tanjungpinang, secara *output* adalah mencapai target nasional, yaitu 14% sehingga pemerintah Kota Tanjungpinang menetapkan target penanggulangan *stunting* sebesar 3,48% dari tahun 2021-2023. Sedangkan, secara *outcome* dengan meningkatkan kualitas SDM dan kualitas hidup masyarakat agar terhindar dari *stunting* dan mampu berdaya saing. Selain itu, mewujudkan upaya penurunan angka prevalensi *stunting* dengan menjalin konvergensi dan kolaborasi bersama tim-tim yang telah dibentuk, lintas program, lintas sektor, dan pihak swasta sebagai alat bantu.

Kedua, penurunan angka prevalensi *stunting* dipengaruhi oleh dua jenis lingkungan, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal, mencakup SDM berupa Tim

Audit Kasus *Stunting* dan tim pendukung lainnya, anggaran kesehatan berasal dari APBN dan APBD, teknis pelaksanaan berupa prosedur berjenjang dari laporan status gizi balita melalui aplikasi Sigizi Terpadu meskipun tidak terdapat data balita yang sudah pulih dari *stunting*, serta operasional berupa penguatan infrastruktur pemantauan gizi balita dan penambahan sarana kesehatan (posyandu maupun puskesmas). Lingkungan eksternal meliputi aspek fisik, sosial, dan ekonomi, namun terdapat kendala berupa terjadinya pencemaran lingkungan, pola asuh orang tua yang belum optimal, serta kesulitan ekonomi di masyarakat dalam memenuhi kebutuhan gizi anak.

Ketiga, Arahan dilakukan melalui perintah, yaitu diwujudkan dalam bentuk regulasi dari berbagai tingkat pemerintah yang dikeluarkan untuk menurunkan angka prevalensi *stunting* sebagai pedoman pelaksanaan. Koordinasi, melibatkan seluruh pihak melalui forum pertemuan. Motivasi, dengan membangun pemberdayaan masyarakat, penghargaan, dan evaluasi hasil kerja. Komunikasi, berperan dalam menyebarkan informasi serta mengakomodir kegiatan-kegiatan yang telah disusun.

Keempat, intervensi sensitif dilakukan oleh DKP2KB Kota Tanjungpinang melalui konvergensi dan kolaborasi yang berguna memfasilitasi inovasi dan bantuan, monitoring, serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Selain itu, mengadakan penyuluhan melalui media cetak, digital, dan pertemuan. Sedangkan, intervensi spesifik meliputi intervensi terhadap kesehatan yang salah satunya adalah pemantauan tumbuh kembang anak di posyandu maupun sistem *sweeping* serta penyediaan PMT pangan lokal. Hasilnya, masih terdapat intervensi yang belum mencapai target, serta PMT pangan lokal memberikan dampak positif pada peningkatan berat badan anak, tetapi ibu balita merasa berat badan anak masih fluktuatif dan bantuan yang diberikan tidak bersifat berkesinambungan. Adapun, kegiatan *sweeping* dinilai kurang efektif karena kurang memotivasi ibu balita untuk mengunjungi posyandu.

Kelima, terdapat sejumlah keberhasilan yang didapatkan Kota Tanjungpinang, yaitu menurunnya angka prevalensi *stunting* menurut survei nasional, menurunnya jumlah kasus, dan tercapainya target capaian kinerja pada program *stunting*. Dengan demikian, DKP2KB Kota Tanjungpinang beserta jajarannya telah melaksanakan seluruh program yang telah dirancang, namun keefektifitasannya sangat bergantung pada partisipasi aktif dari masyarakat untuk ikut terlibat, mengubah pola perilaku, dan pola hidup yang buruk.

Saran

1. Menetapkan tujuan strategis yang mampu meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat;

2. Melibatkan seluruh keluarga risiko *stunting* (KRS) untuk perbaikan lingkungan dan melakukan pengawasan penuh;
3. Membuat regulasi yang mengikat agar mendorong partisipasi dari masyarakat;
4. Melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan meningkatkan penganggaran yang memadai dan berkesinambungan;
5. Melakukan evaluasi mengenai pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat, serta meninjau ulang keefektivitasan dari program PMT pangan lokal dan *sweeping*.

DAFTAR REFERENSI

- Achyani, N., Noor, R., & Wibowo, S. B. (2018). *Model intervensi komunitas (Menciptakan masyarakat yang sadar lingkungan wisata)*. CV. Laduny Alifatama.
- Alam, U. M. (2023). Perlu terobosan dan intervensi tepat sasaran lintas sektor untuk atasi stunting. *Kemenkopmk.go.id*. <https://www.kemenkopmk.go.id/perlu-terobosan-dan-intervensi-tepat-sasaran-lintas-sektor-untuk-atasi-stunting>
- Azizah, N., Nastia, & Sadat, A. (2022). Strategi dinas kesehatan dalam menekan laju penderitaan stunting di Kabupaten Buton Selatan. *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(12), 4145–4152.
- Bappenas. (2021). *Perpres percepatan penurunan stunting untuk perbaikan gizi Indonesia*. Bappenas.go.id. <https://www.bappenas.go.id/id/berita/perpres-percepatan-penurunan-stunting-untuk-perbaikan-gizi-indonesia-2oPyg>
- Budiasih, N. L. (2021). Upaya intervensi guru untuk meningkatkan tindak tutur ekspresif siswa kelas IVB SDN 4 Tonja, Kecamatan Denpasar Utara dalam proses belajar mengajar. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 47–63.
- DKP2KB Kota Tanjungpinang. (2024). Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kader Posyandu. *Dkp2kb.tanjungpinangkota.go.id*. <https://dkp2kb.tanjungpinangkota.go.id/index.php/component/content/article/pelaksanaan-sertifikasi-kompetensi-kader-posyandu?catid=23&Itemid=101>
- Hamdani. (2023). Struktur Satgas Stunting Provinsi Kepri. *Kepri.nu.or.id*. <https://kepri.nu.or.id/daerah/struktur-satgas-stunting-provinsi-kepri-mM4gR>
- Haskas, Y. (2020). Gambaran stunting di Indonesia: Literatur review. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis*, 15(2), 154–157.
- Hizriyani, R., & Aji, T. S. (2021). Pemberian ASI eksklusif sebagai pencegahan stunting. *Jurnal Jendela Bunda PG PAUD UMC*, 8(2), 55–62. <https://ojs.nchat.id/index.php/nchat/article/view/13>
- Junaidah. (2022). *Implementasi manajemen strategis dalam pendidikan tinggi Islam*. AURA CV. Anugrah Utama Raharja.
- Khalid, S. H., Patimah, S., & Asrina, A. (2022). Persepsi masyarakat mengenai penyebab dan dampak stunting di Kabupaten Majene Sulawesi Barat tahun 2020. *Journal of Muslim*

Community Health (JMCH), 3(4), 80–94. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jmch/article/view/1177/1366>

- Mahardika, M. N., Trisiana, A., Widyastuti, A., Juhaena, J. S., & Kirani, R. M. A. (2020). Strategi pemerintah dan kepatuhan masyarakat dalam mengatasi wabah Covid-19 berbasis semangat gotong royong. *Jurnal Global Citizen (JGC): Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, IX(1), 39–50.
- Mulgan, G. M. (2009). *The art of public strategy: Mobilizing power and knowledge for the common good*. Oxford University Press.
- Nurhasanah, Afrika, E., & Rahmawati, E. (2022). Hubungan ASI eksklusif, status gizi dan faktor genetik terhadap kejadian stunting pada anak usia 24-59 bulan di wilayah kerja Puskesmas SP Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Ar-Rum Salatiga (JIKA)*, 6(2), 19–26.
- Padli, H. (2021). *Intervensi sekolah penggerak*. In U. Khasanah (Ed.), CV. Tahta Media Group.
- Pemerintah Kota Tanjungpinang. (2020). *Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kota Tanjungpinang tahun 2021*.
- Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 22 Tahun 2023 tentang percepatan penurunan stunting, Pub. L. No. 22 (2023).
- Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 28 Tahun 2023, Pub. L. No. 28 (2023).
- Purwaningtyas, N. H. (2023). *Stunting*. Sdgs.ub.ac.id. <https://sdgs.ub.ac.id/stunting/>
- Puskesmas Gamping II. (2023). Apa itu stunting? Yuk cari tahu di sini. [Pkmgamping2.slemankab.go.id. https://pkmgamping2.slemankab.go.id/apa-itu-stunting-yuk-cari-tahu-disini/#:~:text=Q%3A](https://pkmgamping2.slemankab.go.id/apa-itu-stunting-yuk-cari-tahu-disini/#:~:text=Q%3A)
- Rahayu, A. S. (2018). *Pengantar pemerintahan daerah: Kajian teori, hukum, dan aplikasinya*. Sinar Grafika.
- Rusfiana, Y., & Supriatna, C. (2021). *Memahami birokrasi pemerintahan dan perkembangan*. CV. Alfabeta.
- Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. (2019). *Strategi nasional percepatan pencegahan anak kerdil (stunting) periode 2018-2024 (Kedua)*. Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.
- SKI. (2024). *Factsheets: Stunting di Indonesia dan determinannya* (pp. 1–2). Kemenkes BKPK.
- Thahir, B. (2019). *Pemerintah dan pemerintahan Indonesia sebuah bunga rampai*. <http://fisip.untirta.ac.id>
- Timpal, E. T. V., Pati, A. B., & Pangemanan, F. (2021). Strategi camat dalam meningkatkan perangkat desa di bidang teknologi informasi di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–10.
- UNICEF, WHO, & World Bank Group. (2023). *Level and trends in child malnutrition* (N.

Reuter & J. D'Aloisio, Eds.). UNICEF/WHO/World Bank Group.

Vidianti, S. R., & Jumiati, I. E. (2023). Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 40 Tahun 2021 tentang percepatan pencegahan stunting terintegrasi di Kabupaten Serang. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 213–232. <https://doi.org/10.52316/jap.v19i2.150>